

Pertimbangan Turki Dalam Menyetujui *EU-Turkey* *Statement 2016: Penanggulangan Pengungsi dan Irregular* *Migrants di Eropa*

**Fitria Wulandari Omnif¹, Dr. Muhammad Yusra, S.IP, MA², Maryam
Jamilah, S.IP, M.Si³**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹fitriaw33@gmail.com, ²muhammadyusra@soc.unand.ac.id,
³maryamjamilahmj73@gmail.com

Abstract

In 2016, European Union and Turkey had EU-Turkey Statement partnership to manage refugees flow who involved in irregular migration to EU. This partnership required Turki to reduce the irregular migration rate and to bring those irregular migrants back to Turkey. Turkey agreed on this agreement despite hosting a huge amount of refugees and being host country with the largest number of refugees globally. This study aimed to analyze the consideration done by Turkey in agreeing the partnership. The research method used is qualitative with descriptive approach. This study was analyzed with national security policy conceptual framework which explains state behavior in policy making by Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. There are four considerations in policy making process such as interests and objectives, opportunities, threats, and capabilities. Based on the concept used, this study found that Turkey considered three things in agreeing EU-Turkey Statement 2016. Firstly, the interests and objectives from political and economical aspect which are EU membership negotiation, visa liberalization, and EU financial aid for taking care of refugees in Turkey. Secondly, the opportunities for Turkey to leverage/uplift its bargaining power. Thirdly, consideration about its capabilities in facing refugee flow in political, social, and economical aspects.

Keywords: European Union, EU-Turkey Statement, Irregular Migrants, Syria, Turkey.

Received **Revised Published**

Pendahuluan

Suriah merupakan negara yang berkontribusi paling besar terhadap jumlah pengungsi. Pada tahun 2015, total pengungsi Suriah nyaris mencapai lima juta orang dari yang sebelumnya berjumlah 3,9 juta pada tahun 2014 dan 2,5 juta pada tahun 2013. Sementara itu, Eropa merupakan salah satu kawasan yang terdampak arus pengungsi di mana tahun 2014, pengungsi yang masuk ke Eropa

meningkat sebanyak 1,3 juta orang dari yang sebelumnya terdapat 1,7 juta orang pada awal tahun.

Rute Mediterania Timur adalah jalur terdekat bagi pengungsi Suriah untuk masuk ke Eropa, yakni melalui Laut Aegea yang titik keberangkatannya adalah Turki. Pada tahun 2015, terdapat 885.386 *irregular migrants* dari berbagai negara yang masuk ke Eropa melalui Mediterania Timur dan 496.340 orang di antaranya berasal dari Suriah (Frontex, 2016). Dengan demikian, fenomena *irregular migrations* menjadi tantangan tersendiri bagi Uni Eropa (UE) selain menghadapi arus pengungsi yang tidak terkendali. Untuk merespons situasi tersebut, pada tahun 2016, UE mengajak Turki berkerjasama. Kesepakatan ini dinamakan *EU-Turkey Statement* dan bertujuan untuk menghentikan arus *irregular migrants* dari Turki ke Eropa.

Kerjasama dengan UE pada tahun 2016 membuat Turki menutup perbatasan dan membendung pengungsi agar tetap berada di Turki. Dengan kata lain, Turki akan menghadapi populasi tambahan di negaranya. Namun, Turki sendiri sebenarnya sejak awal sudah memiliki tanggungan mengurus jutaan orang pengungsi di negaranya. Sejak awal situasi memanas di Suriah pada tahun 2011, Turki telah menerima pengungsi dari Suriah melalui *Open Door Policy* (ODP). Bahkan setelah kesepakatan ini, Turki menanggung 3,9 juta pengungsi pada tahun 2019.

Berikutnya, terdapat perbedaan sikap dari Turki dibandingkan saat negosiasi kerjasama serupa yakni *readmission agreement* di tahun 2013. Negosiasi tersebut diajukan UE sejak tahun 2003, akan tetapi Turki enggan menanggapi, beberapa kali buntu, dan akhirnya tidak terimplementasi. Selain menurunnya antusiasme terhadap keanggotaan UE, hal ini juga disebabkan oleh Turki yang menyadari risiko di mana besar kemungkinan Turki dijadikan zona penyangga oleh UE. Oleh sebab itu, persetujuan pada kesepakatan *EU-Turkey Statement 2016* memperlihatkan hal yang bertolak belakang dengan sikap sebelumnya. Terlebih lagi, kemungkinan penumpukan pengungsi dan *irregular migrants*

dengan adanya kesepakatan ini juga lebih besar seiring memburuknya situasi di Suriah setahun sebelumnya.

Keputusan Turki menyetujui *EU-Turkey Statement 2016* ini pun bertolak belakang dengan keinginan publik. Survei persepsi masyarakat pada tahun 2015 justru mendapati kekhawatiran masyarakat Turki terhadap keberadaan pengungsi Suriah di sekitar mereka. Survei ini memperlihatkan 84 persen responden menilai bahwa imigran dan pengungsi yang saat ini berada di Turki seharusnya dipulangkan. Hal ini juga berimplikasi pada bentuk tindak lanjut yang diinginkan masyarakat Turki agar pemerintah mengambil kebijakan yang lebih restriktif terhadap pengungsi. Singkatnya, tidak hanya berpotensi membebani negara karena implikasinya pada peningkatan populasi pengungsi, kebijakan pemerintah Turki bekerja sama dengan UE pada *EU-Turkey Statement 2016* juga berbeda dari sikap Turki sebelumnya serta tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Fakta-fakta tersebut lantas menjadikan bahasan ini menarik untuk dikaji menimbang bagaimana kebijakan kerja sama yang tampak merugikan justru disanggupi negara Turki. Maka, penelitian ini muncul dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan Turki dalam menyetujui kerja sama EU-Turkey Statement pada tahun 2016.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan batasan masalah isu pengungsi dan *irregular migrants* Suriah mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Penelitian dibatasi dari tahun 2011 disesuaikan dengan waktu dirasakannya dampak *Arab Spring* menjalar ke Suriah dan terbukanya Turki menerima pengungsi Suriah melalui kebijakan ODP pada tahun 2011. Teknis analisis data penulis lakukan dengan merujuk kepada Miles dan Huberman di mana terdapat tiga tahapan menganalisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, data-data yang sebelumnya telah dihimpun sebanyak mungkin kemudian penulis telah pilah sesuai

relevansinya terhadap topik yang penulis angkat. Selanjutnya, data diurutkan ke dalam kategori-kategori dan menghasilkan koleksi data yang sudah terorganisir.

Langkah berikutnya, penulis menganalisis pertimbangan Turki dengan penggunaan kerangka konsep *national security policy* oleh Viotti dan Kauppi yang menerangkan perilaku negara (*state behavior*). Adapun pertimbangan yang dijelaskan konsep terdapat empat yakni kepentingan dan tujuan, peluang, kapabilitas, dan ancaman. Untuk itu, penulis telah mendata kepentingan apa dan tujuan apa yang dimiliki Turki melalui kerja sama ini. Berikutnya, penulis juga telah mencari data-data tentang kapabilitas Turki dalam hal penanggulangan pengungsi di negaranya serta peluang dan ancaman yang Turki hadapi dari sistem global mengenai kerja sama ini. Kemudian, dilakukan penarikan kesimpulan di akhir proses sehingga pertanyaan penelitian terkait pertimbangan Turki menyetujui bekerja sama menanggulangi *irregular migrants* di Eropa pada tahun 2016 terjawab.

Adapun sumber-sumber mengenai kebijakan Turki dan kerja sama Turki bersama Uni Eropa, penulis peroleh dari halaman resmi pemerintah Turki dan Uni Eropa maupun dari pernyataan pejabat tinggi kedua aktor. Adapun untuk mendapatkan gambaran mengenai dinamika konflik Suriah, krisis pengungsi, pergerakan pengungsi dan *irregular migrants*, data-datanya penulis dapatkan dari mengumpulkan artikel berita, jurnal nasional dan internasional serta laporan yang dirilis pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga *think-tank*.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sejumlah artikel-artikel jurnal yang relevan dengan topik yang diangkat agar penulis dapat mendapatkan gambaran lebih jelas dan menjadi acuan analisis. Pertama, penulis menggunakan artikel Bassant Hassib dan Doaa Nounou berjudul *Blocked by Diplomatic Barriers: Syrian Refugees and the EU-Turkey Migration Cooperation*. Selanjutnya, penulis menggunakan artikel yang ditulis seorang dosen Universitas Ankara, Turki berjudul *Shifting From Europeanization to De-Europeanization in Turkey: How AKP Instrumentalized EU Negotiations*.

Artikel ketiga yang penulis gunakan berjudul *Rejected Syrians: Violations Of The Principle Of “Non-Refoulement” In Turkey, Jordan And Lebanon* oleh Vasja Badalič. Keempat, penulis merujuk pada tulisan Alexander Bürgin berjudul *European Commission's Agency Meets Ankara's Agenda: Why Turkey is Ready For a Readmission Agreement*. Tulisan kelima berjudul *The Syrian Refugee Crisis and Foreign Policy Decision-Making in Jordan, Lebanon, and Turkey* oleh Gerasimos Tsourapas.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan konsep *national security policy conceptual framework* dalam buku *International Relations and World Politics*, Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menjelaskan mengenai *state behavior* di mana para pembuat kebijakan mempertimbangkan hal-hal seperti kepentingan (*interests*) dan tujuan (*objectives*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*), dan kapasitasnya (*capabilities*) saat menghasilkan suatu kebijakan luar negeri.

Keuntungan dan Tujuan Turki dalam *EU-Turkey Statement 2016* Negosiasi Akses Keanggotaan UE dan Liberalisasi Visa

Adapun dalam konteks kerja sama *EU-Turkey Statement*, terkandung tujuan negara Turki yang selaras dengan kepentingan dalam pasal lima bab satu konstitusinya yakni mengatasi hambatan politik, ekonomi, dan sosial yang membatasi kehidupan warga negaranya. Dalam kesepakatan ini, UE sekali lagi berkomitmen mempercepat proses liberalisasi visa serta melanjutkan negosiasi akses keanggotaan Turki dalam UE. Maka, bila negosiasi ini lancar, warga Turki dapat bepergian secara leluasa ke 26 negara Eropa tanpa visa. Faktanya, kemudahan mobilitas termasuk daya tarik UE dan merupakan satu dari tiga alasan dominan warga Turki di masa awal.

Adapun mengenai akses, wacana akses Turki memang mengalami pasang surut menyesuaikan dinamika hubungan kedua aktor. Inkonsistensi dari sisi UE memunculkan keraguan masyarakat terhadap reliabilitas UE dan timbul

skeptisme terhadap peluang terealisasinya keanggotaan. Meski prosesnya penuh rintangan dan antusiasme masyarakat mengalami penyusutan, keanggotaan dan liberalisasi visa terlihat masih menjadi tujuan Turki dalam jangka panjang. Adapun dari pemerintah Turki belum ada sikap tegas untuk memutus total negosiasi. Hal ini mengingat bahwa keanggotaan UE masih masuk daftar prioritas di mana Turki menyakini bahwa negaranya adalah bagian dari Eropa serta memiliki peran signifikan dalam hal keamanan kawasan Eropa.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah akses juga dijadikan pemerintah Turki yang dikendalikan oleh partai AKP sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Selama ini, partai AKP menyadari bahwa mengusung ide integrasi UE merupakan cara mengamankan dukungan berbagai kalangan dari awal kemunculannya. Alasan lainnya adalah adanya asistensi *Instrument for Pre-Accession Assistance* (IPA) di mana dalam distribusinya, Turki mendominasi hampir setengah dari anggaran tersebut yakni 4,8 miliar euro (5,4 miliar dolar AS). Akhirnya, *EU-Turkey Statement* membuka jalan lagi bagi Turki untuk melanjutkan upaya negosiasi liberalisasi visa dan keanggotaannya di UE termasuk bantuan asistensi.

EU Facility for Refugees in Turkey (FRiT)

Turki pada tahun 2023 berambisi harus masuk ke posisi sepuluh besar ekonomi terkuat dengan ekonomi dua triliun dolar AS, pendapatan per kapita 25 ribu dolar AS, dan ekspor mencapai 500 miliar dolar AS. Tidak terkecuali Turki, kebijakan yang dibuat pemerintah ditujukan untuk menguntungkan negara. Selain itu, negara selalu sedapat mungkin menghindari dari potensi krisis ekonomi dalam hal ini Turki mengupayakan agar minim terbebani secara finansial akibat krisis pengungsi.

Kesepakatan EU-Turkey Statement pada tahun 2016 memberikan Turki angin segar bantuan finansial. EU Facility for Refugees in Turkey (FRiT) memungkinkan Turki dapat memperoleh bantuan sebesar tiga miliar euro (3,5 miliar dolar AS). Adapun sumber dana berasal dari anggaran UE sebesar empat

miliar dan dua miliar sisanya dari iuran negara anggota berdasarkan tingkat PNB. Pada implementasinya, distribusi anggaran ini juga lebih cepat lima kali lipat daripada IPA disebabkan birokrasi pencairan lebih efisien mengingat 70 persen porsinya disalurkan melalui organisasi PBB dan organisasi finansial internasional lainnya. Hal ini juga akhirnya membuat program-program skala besar bisa cepat terlaksana. Dengan demikian, Turki dapat terbantu menekan beban negara selama menampung pengungsi disebabkan sebagian tanggungan biaya beralih pada UE melalui *EU-Turkey Statement*.

Menaikkan Posisi Tawar Turki Melalui *EU-Turkey Statement 2016*

Sebagian besar dari pengungsi datang melalui jalur Mediterania Timur secara ilegal. Menyeberangi laut Aegea dengan bantuan penyelundup, 885.386 orang *irregular migrants* masuk ke Eropa pada tahun 2015. Pada tahun 2010 saja, 80 persen dari penyeberangan ilegal ke UE masuk melalui perbatasan Turki. Dengan kata lain, dalam melihat dinamika arus pengungsi ke Eropa tidak dapat dilepaskan dari Turki.

Tindak tanduk mengenai manajemen pengungsi dan *irregular migrants* oleh pemerintah Turki menjadi krusial dampaknya bagi UE. Dapat dipahami bahwa kesetujuan Turki dalam *EU-Turkey Statement 2016* merupakan bantuan besar bagi UE. Namun, dalam jangka panjang terdapat peluang di mana UE semakin lama menjadi semakin dependen pada Turki dalam hal manajemen arus pengungsi. Hal ini disebabkan Turki menjadi penentu dalam upaya UE menekan arus pengungsi dan menjaga internalnya tetap stabil dan harmonis. Terlebih lagi, selama ini UE cenderung mengandalkan kerja sama dengan pihak eksternal daripada memperbaiki sistem di internalnya. Maka, Turki kini bukan lagi sebatas negara kandidat tengah antri menunggu pintu masuk UE tanpa kepastian sebagaimana relasi selama ini melainkan muncul jadi mitra strategis yang paling dibutuhkan UE untuk kelangsungan stabilitasnya jika ingin mengendalikan arus perpindahan orang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pengungsi yang lintas menjadi *irregular migrants* sesungguhnya memberikan keuntungan bagi Turki atas UE dan menempatkan Turki pada posisi yang seimbang dengan UE atau bahkan lebih. Terlebih lagi, temuan dari Liempt mengungkapkan bahwa para *irregular migrants* dengan sendirinya akan kembali mencari cara menyeberangi laut Aegea ke Eropa via jalur illegal. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan di masa depan akan ada perjanjian serupa dengan Turki mengupayakan mendapat insentif yang bervariasi dari UE.

Kapabilitas Turki Menghadapi Situasi Akibat Krisis Pengungsi

Turki memiliki kapabilitas yang cukup terkait persoalan pengungsi Suriah. Sumber daya manusia menjadi kapabilitas politik yang Turki miliki dan sudah ditunjukkan dari kesanggupan Turki menanggung dan mengurus jutaan pengungsi yang selalu bertambah dari tahun sebelumnya. Selain itu, kecakapan Turki dalam membangun sejumlah kamp pengungsi dalam waktu singkat dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok di awal krisis tidak dapat diabaikan. Adapun untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengakomodasi pengungsi Suriah di Turki, kolaborasi antar kementerian dan pemerintah Turki juga mulai menyiapkan rencana untuk jangka panjang bagi komunitas pengungsi. Di samping itu, kerja sama dengan organisasi internasional seperti badan PBB dan NGO juga dilakukan.

Adapun dari segi kapabilitas sosial dan budaya yang Turki miliki dapat dilihat dari kohesi sosial di tengah masyarakatnya. Adapun sebuah survei di Istanbul dan Ankara, kota dengan populasi pengungsi terbanyak, mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 persepsi negatif terhadap orang asing meningkat rata-rata dua kali lipat dari enam tahun sebelumnya. Maka, tidak mengherankan bahwa publik Turki juga cenderung menginginkan pemerintah lebih membatasi pengungsi. Akan tetapi, situasi ini sendiri pun tidak bisa dipungkiri kuat dipengaruhi oleh pemberitaan media yang berlebihan dan lebih banyak menyoroti hal negatif dari pengungsi. Hal ini dibuktikan laporan dari

Kementerian Dalam Negeri Turki di mana faktanya adalah di antara catatan kasus dari 2014 hingga 2017, hanya 1,32 persen kasus yang pengungsi Suriah betul-betul terlibat di dalamnya.

Di samping itu, persoalan pengungsi ini dari aspek kohesifitas masyarakat Turki masih terkendali di mana sebuah survei oleh pusat penelitian di Universitas Hacettepe mendapati bahwa perubahan pandangan terhadap pengungsi di kalangan masyarakat tidak mengurangi secara signifikan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pengungsi. Situasi Turki dianggap cukup unik karena tensi tidak sampai ke tahap yang mengakibatkan perubahan ekstrem dalam tatanan masyarakat secara keseluruhan. Situasi yang masih kondusif juga disebabkan karena isu ini belum meluas ke ranah politik sebagaimana yang terjadi di negara lain. Kesimpulannya, meski penerimaan sosial ini harus tetap diiringi perbaikan organisasi dari pemerintah untuk mempertahankan situasi, akan tetapi dapat terlihat kapabilitas sosial budaya Turki yang cukup mumpuni untuk terus menyerap pengungsi.

Adapun Turki termasuk negara dengan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik dan menempati dua puluh besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia sebagaimana laporan World Bank pada tahun 2014. Adapun dari segi ketahanan, Turki masih lebih baik dalam kemampuan mengantisipasi krisis ekonomi dibandingkan sejumlah negara anggota UE. Pascakrisis ekonomi di 2009-an misalnya, Turki dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,2 persen di tahun 2010 dan 8,5 persen di tahun berikutnya di mana cukup kontras dengan sejumlah besar negara Eropa yang masih membenahi perekonomian mereka.

Menurut konsep yang diterangkan Viotti dan Kauppi, seharusnya terdapat pertimbangan keempat yakni pertimbangan mengenai ancaman. Akan tetapi, penulis tidak menyertakan bagian ini dalam pemaparan analisis. Hal ini disebabkan penulis tidak menemukan data yang mengindikasikan adanya ancaman signifikan dari sistem global yang lantas mengharuskan Turki untuk bekerja sama dengan UE dalam *EU-Turkey Statement 2016*. Sebaliknya, justru

rekan kerja samanya yakni Uni Eropalah yang menghadapi ancaman akibat arus pengungsi dan *irregular migrants* sehingga harus bekerja sama dengan Turki. Maka, menimbang tidak ditemukannya data terkait, penulis kemudian menyimpulkan aspek ancaman tidak termasuk dalam pertimbangan yang mendorong kesetujuan Turki bekerja sama.

Tabel 1. Hasil Analisis Pertimbangan Turki dalam *EU-Turkey Statement* 2016

Pertimbangan Turki		Temuan
Keentingan dan Tujuan		
Politik	Negosiasi Akses dan Liberalisasi Visa	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Turki pada dasarnya masih menjadikan keanggotaan sebagai prioritas karena menyakini dirinya bagian dari Eropa serta berperan signifikan dalam keamanan kawasan Eropa. - Kesetujuan ini selaras dengan konstitusi bab satu yakni mengatasi hambatan politik, ekonomi, dan sosial yang membatasi kehidupan warga negara. - Akan tetapi, tujuan ini tidak untuk dicapai dalam jangka pendek sebagaimana partai pemerintah saat ini cenderung menjadikannya sebagai alat politik. - Bantuan asistensi bagi negara kandidat (IPA) menguntungkan bagi Turki, Turki mendominasi hampir setengah dari anggarannya
Ekonomi	EU FRiT	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama ini mendanai sebesar enam miliar euro (7 miliar dolar AS) untuk pengungsi di Turki. - Distribusi bantuan ini 5x lebih cepat dari IPA sehingga program cepat terlaksana.
Peluang		
Kenaikan Posisi Tawar		<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar dari pengungsi datang melalui jalur Mediterania Timur (dari Turki) secara ilegal. - Tindak tanduk manajemen pengungsi dan <i>irregular migrants</i> oleh pemerintah Turki menjadi krusial dampaknya bagi UE. - Turki bukan lagi sebatas negara kandidat tanpa kepastian, akan tetapi muncul jadi mitra strategis yang paling dibutuhkan jika UE ingin mengendalikan arus perpindahan orang. - Jumlah pengungsi masif dan elit politik menyadari signifikansi posisi geografis Turki sehingga dapat menggunakan strategi ancaman.
Kapabilitas		
Kapabilitas Politik		Kolaborasi instansi pemerintah Turki dan mulai menyiapkan rencana untuk jangka panjang bagi komunitas pengungsi.
Kapabilitas Sosial-Budaya		<ul style="list-style-type: none"> - Opini yang kurang baik nyatanya akibat pemberitaan media yang berlebihan. - Situasi masih kondusif karena perubahan pandangan terhadap pengungsi di kalangan masyarakat tidak sampai mengakibatkan perubahan ekstrem dalam tatanan masyarakat secara keseluruhan dan belum meluas ke ranah politik
Kapabilitas Ekonomi		Turki masih lebih baik dalam kemampuan mengantisipasi krisis ekonomi dibandingkan sejumlah negara anggota UE lain.

Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan di atas, kesimpulannya adalah bahwa keputusan Turki dalam menyetujui kerja sama *EU-Turkey Statement* mempertimbangkan kepentingan dan tujuan, peluang dan kapabilitas. Pada pertimbangan kepentingan dan tujuan, Turki memiliki kepentingan dari segi politik dan ekonomi melalui kerja sama ini yakni negosiasi akses dan liberalisasi visa serta bantuan finansial terhadap pengungsi di Turki yang dinamakan FRiT. Pada pertimbangan peluang, terlihat bahwa Turki melalui kerja sama *EU-Turkey Statement 2016* ini berpeluang menaikkan posisi tawarnya dan menggunakan arus pengungsi sebagai kartu as di mana bisa jadi di kemudian hari melalui strategi ancaman memungkinkan terjadi kesepakatan terkait lainnya yang menguntungkan. Adapun naiknya daya tawar Turki ini memungkinkan terjadi karena dalam jangka panjang UE semakin mengandalkan Turki untuk mengatasi *irregular migrants* di kawasannya. Di samping itu, Turki juga mempertimbangkan kapabilitas yang dimilikinya terkait keberadaan pengungsi di negaranya di mana sejak sebelumnya Turki mampu menanggung keberadaan pengungsi di negaranya, terdapat kolaborasi antar instansi, perekonomian Turki yang bertumbuh dan cukup adaptif saat krisis, dan kondisi sosial budayanya pun cukup stabil untuk terus menyerap pengungsi.

Daftar Pustaka

Ahmadoun, Souad. "Turkey's Policy Toward Syrian Refugees." SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) Comments, 2014.

Badalič, Vasja. 2019. "Rejected Syrians: Violations Of The Principle Of "Non Refoulement" In Turkey, Jordan And Lebanon." *Dve Domovini – Two Homelands* Vol. 49: 87-122.

Bürgin, Alexander. 2012. "European Commission's Agency Meets Ankara's Agenda: Why Turkey is Ready for a Readmission Agreement." *Journal of European Public Policy* Vol. 19, No. 6: 883-899. doi:10.1080/13501763.2011.614151

Dagi, Dogachan. 2020. "The EU-Turkey Migration Deal: Performance and Prospects." *European Foreign Affairs Review* Vol. 25, No. 2: 197–216.

Erdoğan, Emre. *Unwanted, Unwelcome: Anti-Immigration Attitudes in Turkey*. Washington DC: The German Marshall Fund of the United States, September 2014. (diakses pada 20 Agustus 2021).

Erdoğan, M. Murat. *Syrians in Turkey: Social Acceptance And Integration*. Istanbul: Hacettepe University Migration and Politics Research Center-HUGO, November 2014 (diakses pada 26 September 2021).

“Erdogan Warns 'Millions' of Refugees Heading to Europe.” Deutsche Welle, March 2, 2020. <https://www.dw.com/en/erdogan-warns-millions-of-refugees-heading-to-europe/a-52603580>

European Commission. “Return and Readmission.” https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission_en (diakses 10 April 2021)

France-Presse, Agence. 2016. “Turkish President Threatens to Send Millions of Syrian Refugees to EU.” *The Guardian*, February 12, 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/feb/12/turkish-president-threatens-to-send-millions-of-syrian-refugees-to-eu>

Frontex. 2016. *Risk Analysis for 2016*. Warsaw: Frontex.

Hassib, Bassant, Doaa Nounou. 2016. “Blocked by Diplomatic Barriers: Syrian Refugees and the EU-Turkey Migration Cooperation.” *European Journal of Social Sciences Education and Research* Vol. 3, No. 3: 70–79.

International Crisis Group. 2018. *Turkey’s Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions*. Brussels: International Crisis Group.

International Organization for Migration. 2011. *Glossary on Migration 2nd Edition*. Geneva: International Organization for Migration.

Izzatinnisa, I., Muhammad Yusra, & Maryam Jamilah. (2022). *REPATRIASI PENGUNGGI SURIAH: PERUBAHAN KEBIJAKAN TURKI DALAM MERESPON KRISIS PENGUNGGI*. *Palito*, 1(01), 19–44.

Khaira, A. N., Yusra, M., & Dermawan, R. (2022). Angela Merkel’s Perception and Open Door Policy during the 2015 European Refugee Crisis. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(1), 1–13.

Liempt, Ilse van, M.J. Alpes, dkk. *Evidence-based assessment of migration deals the case of the EU-Turkey Statement*. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2017 (diakses pada 2 Oktober 2021).

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey. Turkey's Enterprising And Humanitarian Foreign Policy. <https://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa>.

Modebadze, Valeri, Fatih Mehmet Sayın. 2017. "Why Turkey Should Join The European Union: Arguments In Favor of Turkish Membership." *Journal of Liberty and International Affairs* Vol. 1, No. 2: 1-9.

Oltean, Priscilla, Claudia Anamaria Iov. 2017. "EU-Turkey Negotiations In The Context Of Securitized Migration After The 2015 Refugee Crisis: Joint Action Plan And The Readmission Agreement." *Research and Science Today Supplement* No. 1: 104.

Rabasa, Angel, F. Stephen Larrabee, *The Rise of Political Islam in Turkey*. Santa Monica: The RAND Corporation, 2008 (diakses pada 1 Oktober 2021).

Sipahioğlu, Buket Ökten. 2017. "Shifting From Europeanization to De-Europeanization in Turkey: How AKP Instrumentalized EU Negotiations." *Milletleraras The Turkish Yearbook of International Relations* Vol. 48: 51-67.

Stiglmeier, Alexandra. 2012. "Visa-Free Travel For Turkey: In Everybody's Interest." *Turkish Policy Quarterly* Vol. 11, No. 1: 99-109.

Şimşek, Doğu. 2017. "Turkey as a "Safe Third Country"? The Impacts of the EU Turkey Statement on Syrian Refugees in Turkey." *Perceptions* Vol. 22, No. 4: 161-182.